

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lihat dari dimensi akuntabilitas yaitu:

##### **1. Dimensi Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran**

Dalam memperoleh laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel bebas dan bersih maka Pemerintah Daerah Kota Kupang berpegang teguh pada dasar hukum yang berlaku yaitu Pasal 3 Angka (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dalam Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

##### **2. Dimensi Akuntabilitas Manajerial**

Dimensi Akuntabilitas Manajerial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam praktek kerjanya BPKAD Kota Kupang mengumpulkan berkas-berkas dari SKPD-SKPD dan mengevaluasikan, melakukan konsolidasi dan verifikasi atas laporan keuangan, apakah benar apa yang dipertanggungjawabkan di SKPD itu sesuai dengan yang sudah dilaporkan dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebelumnya atau tidak, apa

merekan konsisten atau tidak. Setelah BPKAD melakukan penggabungan semua laporan keuangan yang telah diserahkan oleh SKPD dan melakukan analisis kembali yaitu prosedur analisis terhadap laporan keuangan, bahwa keterkaitan terhadap laporan keuangan yang satu dan laporan keuangan yang lainnya diuji dan terhadap selisi-selisi yang timbul apakah dapat dijelaskan atau tidak dan setelah BPKAD melakukan kewajibannya barulah diserahkan kepada BPK untuk di audit.

### 3. Dimensi Akuntabilitas Program

Dimensi Akuntabilitas Program yaitu pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya BPKAD Kota Kupang berpegang teguh pada dasar hukum yang berlaku sehingga BPKAD Kota Kupang berusaha untuk memperoleh laporan keuangan yang akuntabel, bebas dan bersih.

### 4. Dimensi Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi Akuntabilitas Kebijakan yaitu pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam praktek kerjanya BPKAD Kota Kupang menggunakan dimensi akuntabilitas kebijakan ini dengan menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Pasal 3 Angka (7) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dalam Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### 5. Dimensi Akuntabilitas Finansial

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisiensi, efektif, tidak adanya pemborosan, serta korupsi. Pada dimensi ini BPKAD Kota Kupang menggunakan akuntabilitas finansial yaitu dalam menjalankan kewajibannya BPKAD Kota Kupang mengumpulkan data-data laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Kupang yang diserahkan oleh SKPD-SKPD lalu menganalisis dan memverifikasi laporan-laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa laporan keuangan yang diserahkan tersebut memang bersih dan tidak adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang di serahkan oleh SKPD-SKPD tersebut.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel bebas dan bersih berdasarkan hasil wawancara mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sudah cukup baik. Namun masih ada temuan-temuan yang

harus diperbaiki. Oleh karena itu dalam pembuatan laporan keuangan yang akuntabel bebas dan bersih lebih di perhatikan lagi setiap pelaporan keuangannya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel bebas dan bersih.